

TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI HAK INTERPLASI DPRD
KEPADA PEMERINTAH DAERAH

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh

HARUN
NPM : 19460845 FH 05

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
SELONG
2009

TINJAUAN YURIDIS TENTANG IMPLEMTASI HAK INTERPLASI DPRD KEPADA
PEMERINTAH DAERAH



OLEH ;

HARUN
NPM ; 19460845 FH 05

Menyetujui,

Pembimbing I,

ABUDL MUHID, SH.MH
NIDN : 0831126914

Pembimbing II,

TAMRIN SH
NIDN : 0801076601

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah :

1. Pelaksanaan hak interpelasi DPRD Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan berdasarkan mekanisme pengajuan hak interpelasi oleh anggota Dewan yang diajukan oleh 20 orang . Namun ketika dalam sidang hak interpelasi pihak Eksekutif (Bupati) tidak hadir.
2. Alasan yang menyebabkan terjadi pro dan kontra dalam pelaksanaan hak interpelasi di DPRD Kabupaten Lombok Timur didasari oleh perbedaan pendapat atau pandangan tentang implementasi dari perda zakat itu sendiri.
3. Kendala-kendala dalam pelaksanaan hak interpelasi yang mewajibkan kepada Bupati untuk memenuhi panggilan DPRD untuk meminta keterangannya menyangkut hak interpelasi DPRD tidak dihadiri oleh Bupati sehingga dilakukan pemanggilan paksa sesuai dengan peraturan Tata Tertib DPRD Kab. Lotim pasal 39 ayat (3) dan Undang –undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Susduk pasal 82 ayat (3)